



In partnership with  
**Canada**



# Rencana Aksi Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Provinsi Sumatera Selatan

Penulis: Andre Prasetyo, Ni Putu Sekar Trisnaning Laksemi, Tania Benita, Aрга Pandiwijaya

## Pengantar: Mandat Penyusunan RAD KSB di Tingkat Daerah

Pemerintah Indonesia telah menyusun Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 2019-2024. Inpres mengamanatkan Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) pada tingkat daerah dan mengintegrasikan dengan kebijakan dan rencana pembangunan yang ada melalui pelibatan para pihak.

Perencanaan dari tingkat nasional hingga kabupaten diperlukan untuk mengatasi dilema pengelolaan sawit yang merupakan komoditas ekspor perkebunan utama Indonesia.

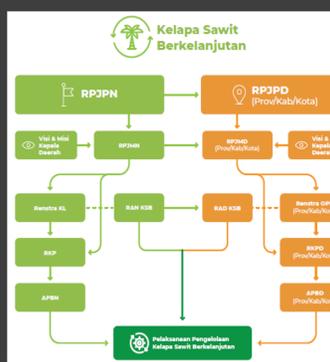
Sebagai provinsi dengan luas kebun sawit yang berada pada urutan ke-5 nasional, komitmen Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan sawit tertuang dalam:

**RPJMD 2019-2023**  
Pengembangan komoditas (termasuk kelapa sawit) melalui pengelolaan SDA berkelanjutan

**Green Growth Plan Prov SumSel 2017-2030**  
Perbaikan tata kelola lahan, penerapan GAP, dan perbaikan rantai nilai

**Renstra Dinas Perkebunan 2019-2023**  
Peningkatan produktivitas sawit melalui intensifikasi dan optimalisasi

### Integrasi Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan\*



## Kelapa Sawit di Sumatera Selatan

"Total luas tutupan lahan kelapa sawit mencapai 1,2 juta hektar, dimana area terbesar terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin, seluas 456.317 hektar, lalu diikuti dengan Kabupaten Banyuasin seluas 325.903 hektar."



Luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan pada tahun 2021 mencapai 1.233.264 ha setara dengan 13,14% luas wilayah provinsi. Terdapat tren peningkatan luas perkebunan sawit dalam 5 tahun terakhir.

Sekitar 658.504 ha atau 54,18% merupakan perkebunan sawit rakyat dengan luas lahan perkebunan plasma mencapai 314.737 ha.

## Isu Strategis RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan

### 1. Pembukaan lahan (land clearing) tanpa bakar

Pembukaan lahan tanpa bakar merupakan upaya untuk mengurangi risiko rentetan kebakaran yang sulit untuk dipadamkan serta polusi udara akibat praktik membuka lahan dengan cara membakar.

### 2. Ketersediaan bibit kelapa sawit bersertifikat

Salah satu best practice dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit adalah adanya ketersediaan bibit kelapa sawit bersertifikat dengan harga terjangkau dan mudah didapatkan.

### 3. Standar tata kelola dan tata budidaya

Salah satu upaya peningkatan standar tata kelola dan budidaya adalah melalui sertifikasi ISPO. Saat ini, realisasi ISPO di Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai 63 perusahaan kelapa sawit.

### 4. Pembukaan kebun kelapa sawit di area kawasan hutan dan gambut

Masyarakat pekebun yang membuka perkebunan kelapa sawit di area kawasan hutan dan area gambut menjadi salah satu pemicu sengketa lahan.

### 5. Penanganan sengketa lahan

Sengketa lahan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit sangat mungkin terjadi baik antar perusahaan perkebunan, antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat, antar masyarakat, antara pemerintah dengan masyarakat.

### 6. Penanganan Hilirisasi Kelapa Sawit

Harga kelapa sawit yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perkebunan sering tidak diberlakukan di lapangan karena pabrik memiliki mekanisme tersendiri dalam membeli TBS kelapa sawit. Belum lagi adanya potongan dalam pembagian TBS kelapa sawit di pabrik.

### 7. Akses Dana Penanaman Kembali (Replanting) Kebun Kelapa Sawit

Petani sawit kecil mandiri sering mengalami kesulitan pendanaan pada saat akan melakukan replanting.

### 8. Pemberdayaan Perempuan dalam Sistem Usaha Tani Kelapa Sawit

Walaupun perempuan memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan sistem usaha tani sawit, pelibatan perempuan dalam pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan masih sangat minim.

## Komponen RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan

### A. Pemberdayaan Perempuan dalam Sistem Usaha Tani Kelapa Sawit

Mencakup (i) penguatan data dan pengelolaan data yang meliputi aspek melengkapi ketersediaan data, menyamakan perbedaan data antar instansi serta meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, (ii) penguatan koordinasi dengan meningkatkan sinergi OPD dan pemangku kepentingan lainnya, (iii) peningkatan layanan infrastruktur terutama mendorong peningkatan kualitas dan sebaran jalan usaha tani.

### C. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Mencakup: (i) meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting, salah satunya ekosistem gambut; (ii) mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar melalui koordinasi dan konsolidasi antar OPD; (iii) mendukung komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis; dan (iv) mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit, dan limbah sawit dan menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan.

### E. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

Sumatera Selatan memiliki 276 perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan luas areal yang telah berizin seluas 1.754.436 ha. Namun, perusahaan yang sudah tersertifikasi ISPO sebanyak 63 perusahaan. Upaya percepatan ISPO menarget perusahaan kelapa sawit serta perkebunan sawit rakyat. Komponen ini juga mencakup peningkatan akses pasar produk kelapa sawit melalui pembangunan hilirisasi perkebunan sawit dan promosi produk melalui misi dagang dan pameran.

### B. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

Kegiatan prioritas untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun antara lain terdiri dari (i) peningkatan kapasitas petani dalam praktik GAP (Good Agriculture Practice), (ii) peningkatan peremajaan tanaman kelapa sawit, (iii) peningkatan kapasitas kelembagaan pekebun dalam penentuan harga, dan (iv) peningkatan kapasitas pekebun sawit melalui penyuluhan dan pendampingan.

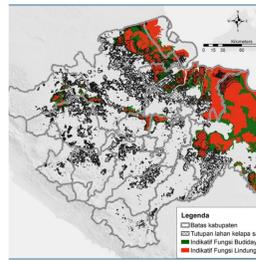
### D. Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

Mencakup (i) mempercepat realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat, (ii) menyelesaikan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan APL, (iii) menyelesaikan status lahan kelapa sawit di dalam kawasan hutan, dan (iv) menyelesaikan status lahan kelapa sawit di ekosistem gambut. Penerapan tata kelola perkebunan juga berfokus pada peninjauan regulasi daerah terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam usaha perkebunan kelapa sawit.

## Kelapa sawit x Fungsi Ekosistem Gambut

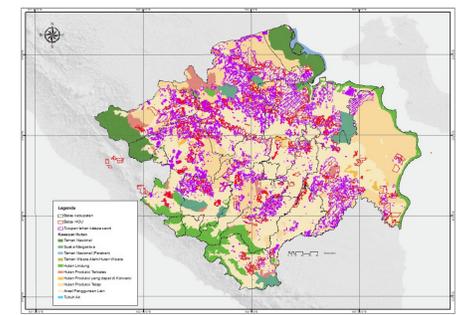
Tutupan lahan kelapa sawit tersebar di 30 KHG dengan luas mencapai 471.717 ha. Sebesar 54,97% berada di fungsi lindung ekosistem gambut dan 45,03% berada di fungsi budidaya ekosistem gambut. KHG dengan tutupan gambut terluas yaitu KHG Sugihan-Sungai Lumpur (56.048 ha), KHG Sungai Burnai-Sungai Sibumbang (51.537 ha), dan KHG Sungai Sembilang-Sungai Lalan (46.211 ha).

Peta Sebaran Kelapa Sawit Berdasarkan Fungsi Lindung dan Fungsi Budidaya



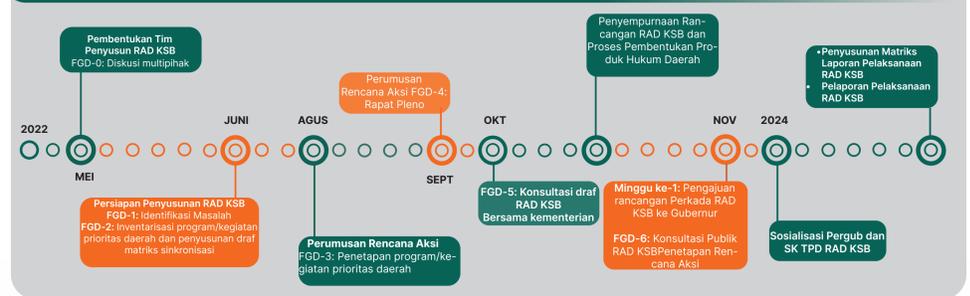
## Kelapa sawit x Kawasan Hutan

Mengacu pada hasil tumpang tindih peta kawasan hutan dan tutupan kelapa sawit, terdapat sebagian tutupan kelapa sawit di kawasan hutan, sekitar 14,2%, terutama di kawasan Hutan Produksi.



Peta tutupan lahan kelapa sawit dan kawasan hutan

## Proses Penyusunan RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan



## Pengarusutamaan Aspek Perubahan Iklim dan Gender

Struktur RAD KSB	Aspek Gambut	Aspek Perubahan Iklim	Aspek Gender
Aspek Gambut	Kebakaran gambut menyumbang emisi GRK	Kebakaran hutan dan lahan, khususnya di perkebunan kelapa sawit	Pemberdayaan perempuan dalam sistem usaha tani kelapa sawit
Aspek Perubahan Iklim	Integrasi dengan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG)	Peningkatan kapasitas petani melalui GAP	
Aspek Gender	Keberadaan kebun kelapa sawit di ekosistem gambut	Tujuan dalam komponen pengelolaan dan pemantauan lingkungan: mendukung komitmen penurunan emisi GRK dan mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan	Pengarusutamaan aspek pemberdayaan perempuan ke dalam rencana aksi RAD KSB
Bab II	Penyelesaian kebun sawit yang terindikasi di ekosistem gambut	Pengarusutamaan aspek perubahan iklim ke dalam rencana aksi RAD KSB: (i) program penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor kebun kelapa sawit, (ii) program pelaporan dan verifikasi (measurement, reportin, and verification/MRV) potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	
Bab II	Pengarusutamaan gambut dalam rencana aksi RAD KSB: (i) program pembuatan peta kelapa sawit di ekosistem gambut, (ii) program evaluasi kebun yang ada di ekosistem gambut;		
Bab III	Dasar hukum dalam penyelenggaraan pendanaan melalui skema APBN melalui Permen LHK No. 7 tahun 2022	APembiayaan: skema insentif dan disinsentif melalui TAPE dan TAKE	

## Rekomendasi Implementasi

- Implementasi program dan kegiatan RAD KSB membutuhkan kolaborasi para pihak, tidak hanya dari unsur pemerintah tapi juga swasta, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, dan lembaga penelitian atau universitas.
- Pelaksanaan program dan kegiatan RAD KSB harus didukung oleh pendanaan yang solid tidak hanya dari sumber dari APBD namun juga sumber-sumber lain seperti skema kompensasi imbal jasa lingkungan hidup (KIJLH), pembayaran jasa lingkungan hidup (PJLH), insentif dan disinsentif, pendanaan privat penghargaan lingkungan, atau pembayaran sektor perbankan.
- Pendekatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kelapa sawit berkelanjutan dilakukan untuk menilai kinerja program dan hasil (outcome) sehingga dapat dilakukan perbaikan desain program di masa yang akan datang. Monev tidak hanya dilakukan di tingkat plot perkebunan atau perusahaan, tetapi perlu difokuskan di seluruh lanskap produksi atau di tingkat yurisdiksi.

Ketersediaan data masih menjadi tantangan dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan. Persoalan mengenai rendahnya ketersediaan data, perbedaan data antar instansi, kurangnya ketersediaan data spasial tutupan lahan kelapa sawit hingga kurangnya kuantitas dan kapasitas SDM perlu segera diatasi untuk memastikan proses perencanaan yang disusun tepat sasaran dan menjawab isu strategis serta permasalahan di lapangan.

Bentang lahan berkelanjutan untuk penghidupan berketahanan iklim di Indonesia

#LahanUntukKehidupan  
www.lahanuntukkehidupan.id